

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tahun 1945 saat Kabinet Presidensial terbentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Kabinet tersebut terdiri dari 12 Menteri Departemen, 5 Menteri Negara, dan 2 Wakil Menteri, salah satunya adalah Menteri Keuangan. Dr. Samsi, yang diangkat oleh Presiden Soekarno, menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia yang pertama. Penunjukan ini menandai awal peran dan fungsi Kementerian Keuangan dalam pemerintahan. Sejak saat itu, Kementerian Keuangan terus berubah dan berkembang agar dapat memenuhi tuntutan dan dinamika zaman, guna mendukung stabilitas keuangan negara.[4]



*Gambar 2. 1 Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia*

Sebagai elemen integral dalam struktur pemerintahan, Kementerian Keuangan memiliki peran krusial dalam mengurus keuangan negara dan memberikan dukungan kepada kepemimpinan negara dalam hal keuangan dan kekayaan nasional. Sebagai wadah penjagaan keuangan negara (Nagara Dana Raca), Kementerian Keuangan berkantor pusat di Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710, Indonesia. Tanggung jawab dan

kepemimpinan langsung Kementerian ini terletak di bawah naungan Presiden, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2020 mengenai Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. [5]

Menteri Keuangan dipilih langsung oleh Presiden Indonesia karena termasuk ke dalam salah satu kabinet Indonesia.[6] Tugas utama Kementerian Keuangan dijalankan dengan bersama berbagai unit kerja, seperti DJA, Bea Cukai, DJP, serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Di samping itu, Kementerian ini melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian Keuangan juga terlibat dalam koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tanggung jawab keuangan negara dapat diemban dengan efektif dan kolaboratif. [7]

### **2.1.1 Visi Misi**

#### **A. Visi**

Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung visi dan misi presiden dan wakil presiden.

#### **B. Misi**

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola fungsi pemerintahan terkait dengan keuangan dan kekayaan negara untuk mendukung Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Serta menyusun, menetapkan, dan memberikan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Kementerian Keuangan berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan keuangan negara, serta mendukung pembangunan ekonomi secara keseluruhan. [8] Sebagian besar lembaga Eselon I yang terkait dengan Kementerian Keuangan berada di kantor pusat, tetapi ada beberapa lembaga Eselon I yang terkait dengan Kementerian Keuangan yang berlokasi di luar kantor pusat [5]



*Gambar 2. 2 Foto Lingkungan Gedung Kemenkeu*

Terlibat dalam program magang di salah satu bagian Kementerian Keuangan, yakni Central Transformation Office (CTO). Bagian ini memiliki tanggung jawab dalam perancangan, pengembangan, dan implementasi inisiatif transformasi organisasi guna meningkatkan kinerja dan efisiensi di dalam kementerian tersebut. Selama magang di divisi ini, terlibat dalam berbagai tugas yang melibatkan analisis data untuk mendukung upaya perbaikan kinerja organisasi.

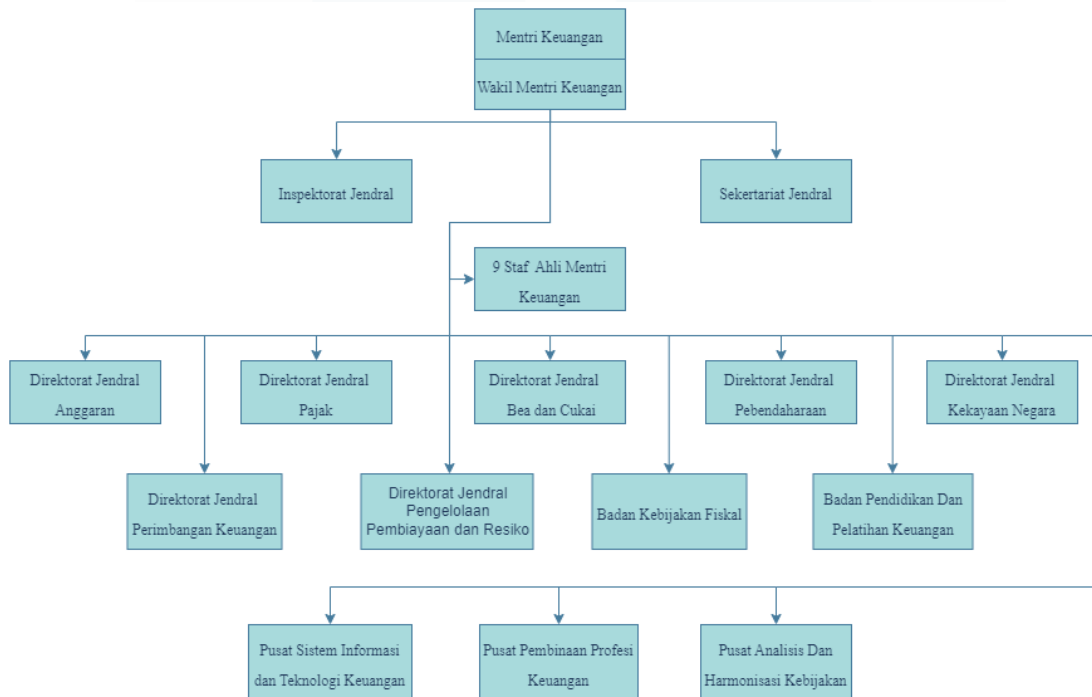
Tujuan pokok dari Central Transformation Office adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, efektif, dan penuh inovasi. Peran utamanya melibatkan identifikasi masalah dan peluang di dalam sistem kerja Kementerian, perancangan strategi guna memperbaiki, dan melaksanakan perubahan yang diperlukan untuk mencapai transformasi yang diinginkan.

Dalam menjalankan fungsi ini, CTO bekerja sama dengan berbagai divisi dan unit di Kementerian Keuangan serta lembaga terkait lainnya. Selain itu, CTO juga berfungsi sebagai pusat pengembangan kapasitas dan peningkatan kompetensi bagi para pegawai di Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah agar para pegawai dapat terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka di era teknologi dan informasi yang terus berkembang pada saat ini. [9]

Dengan berdirinya Central Transformation Office (CTO), diharapkan akan menciptakan respons yang lebih baik dari Kementerian Keuangan terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi yang diterapkan oleh CTO adalah untuk diharapkan dapat meningkatkan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini akan membuat operasional Kementerian Keuangan lebih terbuka dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Akibatnya, diharapkan efektivitas dalam mengelola keuangan negara juga dapat ditingkatkan. [6]

## 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

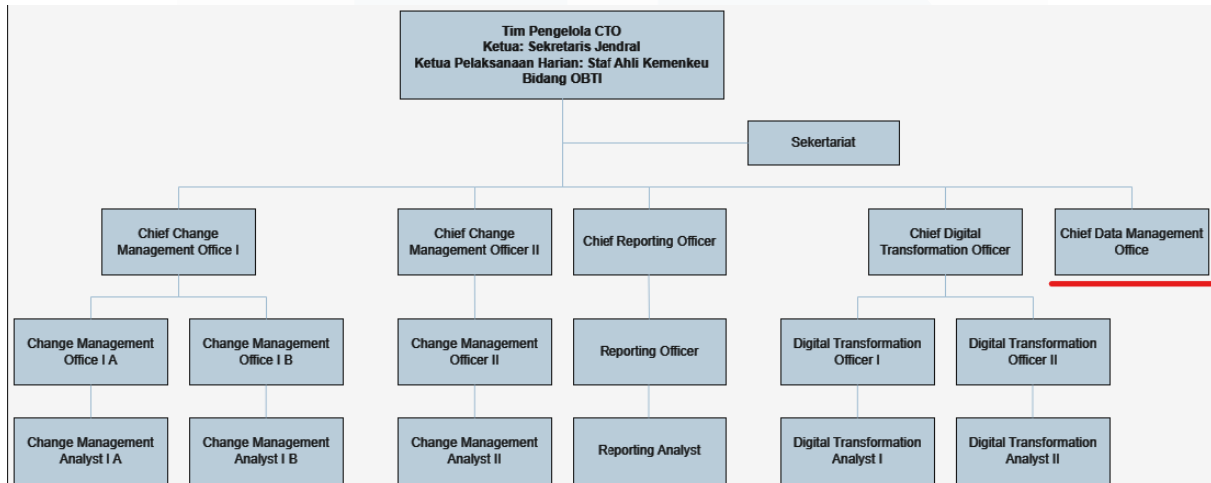
Struktur organisasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Kemenkeu RI

Gambar 2.3 memperlihatkan susunan organisasi pada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan merupakan salah satu badan pemerintah di Indonesia yang bertugas mengelola keuangan negara. Dipimpin oleh seorang menteri keuangan beserta wakilnya, Kemenkeu memiliki peran kunci dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pada keuangan negara. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kemenkeu diperkuat oleh sejumlah unit organisasi-organisasi yang berada di berbagai daerah di Indonesia.

Inilah susunan struktur organisasi dari departemen Central Transformation Office pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia:



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Central Transformation Office (CTO)

Gambar 2.4 menunjukkan susunan organisasi dari Central Transformation Office. CTO dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan memiliki Ketua Pelaksana Harian yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan untuk urusan Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi. Terdapat 16 anggota dalam CTO, dan area yang ditekankan dengan garis merah adalah tempat bagi mereka yang sedang menjalani magang. [9]